

ABSTRAK

Kemunculan situs-situs porno tersebut akan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi bangsa Indonesia terutama generasi muda saat ini, Dengan internet, gambar, cerita dan film porno semakin mudah diperoleh. Cukup dengan mengketik serangkaian kata kepencarian yang ada di *google* ataupun aplikasi search internet lainnya yang identik dengan istilah-istilah yang berkonotasi porno, akan diperoleh segera situs-situs yang menyajikan semua ini.Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan terhadap Pelaku *Cyber pornography*. (2) Untuk mengetahui solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap Pelaku *Cyber pornography*.

Metode pendekatan yuridis sosiologis untuk melengkapi pembahasan yang ada, karena *Cyber Pornography* pada era digital saat ini cukup meresahkan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Hasil dari penelitian yaitu : (1) Upaya Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku *Cyber Pornography* di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Tengah : Sebelum dilakukannya upaya penyidikan oleh Polisi, didahuluikan melakukan penyelidikan untuk mengetahui dan memastikan adanya tindak pidana *Cyber Pornography*, Setelah berkas Berita Acara selesai dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka berjalanlah P21 (berkas sudah lengkap) (2) kendala yang dihadapi Kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku *Cyber pornography* di Kantor Direktorat Reserse kriminal khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah : pelaku menggunakan nama anonym dan identitas yang asal-asalan, sehingga menyulitkan petugas pada saat pelacakan, para pelaku sering mengganti Nomor *handphone*, ketersediaaan barang bukti digital hanya pada korban dan saksi sehingga keaslian barang bukti tersebut hanya pada penerima.,. (3) Solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana *Cyber Pornography* : Pihak Kepolisian berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan media sosial dan Kominfo, Memperkuat peran kominfo sebagai lembaga atau kementerian yang memiliki wewenang untuk melakukan blokir atau penutupan akses terhadap situs-situs yang memuat konten *Cyber pornography*, Mengeluarkan informasi lebih sering dilakukan oleh pemerintah dan media untuk meningkatkan keamanan terhadap masyarakat agar terhindar dari tindakan *Cyber Pornography*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, *Cyber Pornograaphy*, Kepolisian

ABSTRACT

The emergence of pornographic sites will cause various negative impacts for the Indonesian people, especially the younger generation today. With the internet, images, stories and pornographic films are increasingly easy to obtain. Simply by typing a series of search words that exist on Google or other internet search applications that are identical with terms that connote porn, sites will soon be available that present all of this. The purpose of this study is (1) To find out the police efforts in carrying out investigations towards Actors of Cyber pornography. (2) To find out the solutions in overcoming the obstacles faced by the police in conducting investigations to the perpetrators of cyber poronography.

The method of sociological juridical approach to complement the existing discussion, because Cyber Pornography in the digital era today is quite disturbing to the public. This research was carried out by using data collection methods at the Office of the Special Criminal Investigation Directorate of the Central Java Regional Police.

The results of the study are: (1) Police efforts in conducting investigations into Cyber Pornography perpetrators at the Central Java Regional Police Special Crime Investigation Office: Before an investigation is carried out by the Police, prioritization is carried out to investigate and confirm the existence of Cyber Pornography, after the file The Minutes are complete and declared complete by the Public Prosecutor, then P21 (complete file) runs (2) obstacles faced by the Police in conducting investigations against perpetrators of Cyber pornography in the Special Criminal Investigation Office of the Central Java Regional Police: perpetrators use anonym names and identities that carelessly, making it difficult for officers at the time of tracking, the perpetrators often replace mobile numbers, the availability of digital evidence only to victims and witnesses so that the authenticity of the evidence is only for the recipient. (3) Solutions to overcome the constraints faced by the Police in Investigating Cyber Pornography Crime: The police coordinate with social media service providers and Communication and Information Technology, Strengthen the role of Communication and Information Technology as an agency or ministry that has the authority to block or close access to sites that contain Cyber content pornography, releasing information is more often done by the government and the media to improve security for the community to avoid the actions of Cyber Pornography.

Keywords : Law Enforcement, CyberPornograaphy, Police